

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Mengelola Kampung Wisata Hesang di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

**Sances Riangkamang¹
Donald Monintja²
Neni Kumayas³**

Email Korespondensi: sancesriangkamang2003@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kampung Wisata Hesang di Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memiliki potensi wisata alam yang cukup besar, seperti pantai, kawasan mangrove, dan fasilitas pendukung wisata lainnya. Namun, pengelolaan wisata tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, promosi yang belum optimal, serta keterlibatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sombo Kona memiliki peran penting sebagai lembaga desa yang mengelola dan mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan BUMDes Sombo Kona dalam pengelolaan Kampung Wisata Hesang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang meliputi aspek penyadaran masyarakat, pengorganisasian masyarakat, dan penghantaran sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sombo Kona telah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi wisata, mengoordinasikan pengelolaan fasilitas wisata dengan melibatkan masyarakat, serta membuka peluang partisipasi ekonomi bagi masyarakat setempat. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan promosi wisata masih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: BUMDes, Desa Wisata, Pariwisata, Partisipasi Masyarakat,

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Desa Wisata Hesang adalah salah satu contoh destinasi wisata alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Desa Wisata Hesang berada di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Desa Hesang berada pada ketinggian 76 meter dari permukaan laut dan secara keseluruhan desa Hesang merupakan daerah tepi/pesisir pantai. Desa Hesang dicanangkan sebagai Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) oleh BNN dan ditetapkan sebagai Desa Wisata karena potensi alam yang sangat indah. Desa Wisata Hesang secara resmi ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 177/556 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 128/556 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam pengelolaannya, Desa Wisata Hesang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sombo Kona", yang berpedoman pada Peraturan Desa Hesang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Sombo Kona. Jarak tempuh dari Kota Tahuna sampai ke Desa Wisata Hesang ini sekitar 1 jam 15 menit menggunakan mobil atau motor. Kalau dari Bandar Udara Naha sekitar 1 jam 30 menit menggunakan mobil dan motor.

Fasilitas yang ada di Desa Wisata Hesang ini ada areal parkir, balai pertemuan, cafetaria, jungle tracking, kamar mandi umum, kuliner, outbound, selfie area, spot foto dan tempat makan. Dengan keberadaan fasilitas

yang ada tempat wisata ini termasuk dalam kategori Wisata Terpadu yang menggabungkan berbagai jenis wisata dalam satu Kawasan. Secara umum, kehadiran unsur alam seperti pantai dan jungle tracking menjadikan Kawasan ini relevan sebagai bagian dari pengembangan wisata alam yang berbasis pada potensi lingkungan sekitar. Sementara itu, wahana outbound dan spot foto modern turut mendukung daya tarik Kawasan ini sebagai destinasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan masa kini. Fasilitas penunjang lainnya seperti toilet umum, dan area makan mencerminkan kesiapan Kawasan ini untuk menerima kunjungan dalam skala besar dan beragam latar belakang.

Seluruh hasil dari fasilitas dan aktivitas pariwisata yang ada di desa tersebut masuk sebagai pendapatan BUMDes. Selanjutnya, dana yang terkumpul dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku akan diserahkan kepada pemerintah desa dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 25% (Dua puluh Lima persen) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, dan/ atau kegiatan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. dana ini kemudian akan dibahas secara musyawarah oleh pemerintah desa bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan lembaga terkait guna dikelola secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi pembangunan desa.

BUMDes memiliki peran penting dalam mengelola potensi pariwisata.

Keterlibatan mereka dalam proses pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan keberlanjutan pariwisata, mengingat mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Namun dalam pengelolaannya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BUMDes. Salah satu permasalahan utamanya adalah aksesibilitas menuju desa wisata hesang menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata. Kondisi jalan yang rusak mulai dari pintu masuk sampai pada lokasi tujuan menyebabkan wisatawan mengalami kesulitan saat berkunjung. Infrastruktur yang kurang memadai ini berdampak langsung pada kenyamanan pengunjung yang dimana berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk datang kembali. Selain jalan yang rusak, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mempromosikan desa wisata. Yang dimana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam mendukung dan mempromosikan potensi wisata masih rendah dapat menyebabkan upaya promosi desa wisata menjadi kurang maksimal, sehingga destinasi ini belum dikenal luas oleh masyarakat luar. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya peta wisata yang jelas dan informatif di Desa Hesang ini. Ketidakhadanya peta wisata dapat menyulitkan wisatawan dalam mengenali berbagai objek yang menarik yang ada di desa Hesang, serta mengurangi efektivitas promosi destinasi wisata. Peta wisata memiliki peran penting sebagai panduan bagi pengunjung untuk mengeksplorasi berbagai daya tarik desa dan dapat menjadi sarana promosi yang efektif bagi wisatawan.

Maka dari itu peran BUMDes menjadi sangat penting sebagai

penggerak utama dalam mengelola desa wisata, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Hesang di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe..

Penelitian Terdahulu

1. Chindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng – "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe" Persamaan:

- Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, meskipun di desa yang berbeda.
- Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
- Fokus pada peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan:
- Lokasi penelitian di Desa Lenganeng, bukan di Desa Hesang.
- Fokus penelitian lebih kepada efektivitas BUMDes secara umum, bukan spesifik pada pengelolaan desa wisata.
- Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas BUMDes berbeda, lebih menekankan pada optimasi tujuan, perspektif sistematis, dan perilaku pegawai dalam organisasi.

2. Dinan Kurniawan dkk. dengan "Peran BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Mata.

Air Desa Simpang Kanan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024". Penelitian ini menggambarkan peran BUMDes dalam pengelolaan wisata mata air,

termasuk partisipasi masyarakat serta kendala pelaksanaan.

Persamaan:

- Sama-sama mengkaji peran BUMDes dalam pengelolaan desa wisata dengan metode kualitatif.

Perbedaan:

- Lokasi penelitian berada di Tanggamus, Lampung, dengan objek wisata mata air.

3. Anas Arif Ababil & Herry Yulistiyono dengan judul “Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Kahi sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa”. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kabupaten Pamekasan yang menganalisis kontribusi BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Bukit Kahi.

Persamaan:

- Sama-sama meneliti peranan BUMDes dalam desa wisata serta menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan:

- Penelitian ini menitikberatkan pada kontribusi ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek pengelolaan Kampung Wisata Hesang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berperan dalam pengelolaan Kampung Wisata Hesang di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan mengacu pada Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat menurut Hadiwijoyo (2018) :

1. Peran Penyesuaian (conscientization)

2. Pengorganisasian Masyarakat (community organizing)

3. Peran Penghantaran Sumber Daya Manusia (resource delivery)

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan

Pembahasan

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Hesang merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. BUMDes Sombo Kona dibentuk melalui kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa Hesang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Sombo Kona. Proses pendirian ini diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta

tokoh masyarakat, sebagai bentuk penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa. Pendirian BUMDes dilatarbelakangi oleh kebutuhan desa untuk memiliki lembaga ekonomi yang mampu menjadi wadah pengelolaan aset dan potensi desa secara profesional. Dalam konteks Kampung Hesang, potensi alam berupa kawasan pesisir pantai, hutan, serta daya tarik wisata alam lainnya mendorong pemerintah desa untuk membentuk BUMDes sebagai pengelola utama sektor pariwisata. Langkah ini sejalan dengan tujuan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Struktur organisasi BUMDes Sombo Kona disusun secara sistematis dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, mulai dari komisar, pengawas, direktur, hingga pengelola unit usaha. Pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan tata kelola BUMDes berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, BUMDes diharapkan mampu menjalankan perannya tidak hanya sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa.

Keputusan Desa Hesang untuk mengembangkan diri sebagai desa wisata didasarkan pada pertimbangan potensi alam dan sosial budaya yang dimiliki desa tersebut. Secara geografis, Kampung Hesang memiliki keindahan alam pesisir, kawasan hutan, serta lingkungan yang masih alami dan relatif terjaga, sehingga memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata alam. Penetapan Desa Hesang sebagai desa wisata melalui

Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 177/556 Tahun 2023 menjadi legitimasi formal atas potensi tersebut. Pengembangan desa wisata juga dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Melalui sektor pariwisata, desa memiliki peluang untuk menciptakan sumber pendapatan baru di luar sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Selain itu, desa wisata memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung sebagai pelaku utama, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu, tetapi tersebar secara lebih merata. Alasan lain yang mendorong desa mengejar status sebagai desa wisata adalah upaya untuk memperkuat identitas dan citra desa di tingkat daerah. Dengan menjadi desa wisata, Kampung Hesang tidak hanya dikenal sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai destinasi yang memiliki nilai jual dan daya saing. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan desa berbasis potensi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Pola pengelolaan yang diterapkan BUMDes Sombo Kona menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat. BUMDes tidak hanya

mengelola aspek ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan potensi wisata secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan wisata, BUMDes berupaya menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap

keberlangsungan desa wisata. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam pengorganisasian masyarakat dengan melibatkan warga sebagai tenaga kerja, pelaku usaha kecil, dan penyedia jasa pendukung pariwisata. Keterlibatan ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta membuka peluang kerja baru di desa. Dalam konteks penghantaran sumber daya manusia, BUMDes berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembagian peran kerja dan pendampingan dalam pengelolaan usaha wisata, meskipun masih menghadapi keterbatasan dukungan eksternal seperti pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah.

Penutup

Kesimpulan

1. Penyadaran (Conscientization)

BUMDes bersama pemerintah desa berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki kampung, manfaat ekonomi yang dapat diperoleh, serta pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga dan mengelola destinasi. Sosialisasi rutin, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat membuat sebagian masyarakat mulai beralih dari sikap pasif menjadi lebih partisipatif, meskipun tingkat keterlibatan secara keseluruhan masih tergolong rendah.

2. Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)

Pada aspek pengorganisasian masyarakat, BUMDes telah mengatur berbagai mekanisme koordinasi seperti musyawarah desa, forum aspirasi, serta pembentukan unit-unit usaha berbasis potensi lokal. Upaya ini memberikan wadah bagi masyarakat

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan wisata. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan sistem informasi wisata seperti peta dan penunjuk arah, sehingga pelayanan kepada pengunjung belum sepenuhnya optimal.

3. Penghantaran Sumber Daya Masyarakat (Resources Delivery)

BUMDes berperan dalam menyediakan pelatihan kapasitas masyarakat, dukungan finansial, dan diversifikasi unit usaha untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa. Pemerintah desa juga memberikan dukungan anggaran yang menjadi modal penting bagi pengembangan fasilitas dan pelayanan wisata. Meski begitu, sejumlah kendala seperti kerusakan akses jalan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan LSM masih menjadi hambatan dalam upaya pengembangan pariwisata yang lebih maksimal. Secara keseluruhan, peranan BUMDes Sombo Kona sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, namun perlu penguatan lebih lanjut terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, penyediaan sarana informasi, serta perluasan dukungan dari pihak eksternal agar pengelolaan Kampung Wisata Hesang dapat berkembang secara berkelanjutan

Saran

1. Peningkatan Infrastruktur seperti perbaikan akses jalan menuju ke lokasi wisata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan serta mendukung kelancaran operasional desa wisata

2. Pengembangan kapasitas SDM berkelanjutan seperti pelatihan dan peningkatan masyarakat di bidang manajemen keuangan BUMDes, pelayanan wisata, serta pemanfaatan media social perlu terus diperkuat untuk memperluas promosi dan memperbaiki kualitas layanan wisata.
3. Penguatan sinergi dan partisipasi seperti mendorong kolaborasi antara pengeola BUMDes, masyarakat pemerintah desa, dan pihak luar agar dukungan finansial dan non finansial semakin maksimal dan transparan serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan wisata

Daftar Pustaka

- Ababil, Anas Arif, And Herry Yulistiyono. 2022. "Peran Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Keki Sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmiah Aset* 24(2): 97–112.
- Agus Supriatna. 2020. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat." *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 12(3): 561–78.
- Andriyani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, And Muhamad. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23(1): 16. [Http://Jurnal.Ugm.Ac.Id/Jkn%0avolume](http://Jurnal.Ugm.Ac.Id/Jkn%0avolume).
- Apriliani, Laming, Engka Daisy S.M, And Jacline I. Sumual. 2023. "Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi: Pantai Ria Kolongan Beha)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23 No.3.
- Asep Suryadi, Budiman Rusli, Mohammad Benny Alexandri. 2021. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung." *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 4(1): 158.
- Asghary, Haykal. 2020. "Strategi Komunikasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Dalam Meningkatkan Minat Wisatawan." *Commicast* 1(1): 6.
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, And Joorie M Ruru. 2002. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (Jap)* 04(048): 243.
- Eddyono, Fauziah. 2020. 7 *Jurnal Ilmu Pendidikan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*.
- Erasmus Humanika1, Agung Trisusilo2, Risqi Firdaus Setiawan1. 2023. "Peran Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pencapaian Sdgs Desa." 03(02): 102.
- Falicha Qolby, Affania. 2024. "Analisis Dampak Pengembangan Kawasan Wisata Tani Desa Betet." [Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/220241/1/AffaniaFalichaQolby.Pdf](http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/220241/1/AffaniaFalichaQolby.Pdf).
- Ginting, Siska, And Muhammad Immanudin Kandias Saraan. 2025. "Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Potensi Desa Durin Tonggal

- Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Administrasi Publik* 21(1): 141–62.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Suluh Media
- Hanibe Putri, Tristanty Et Al. 2022. 6 Analisis Strategi Pemasaran Pariwisata Untuk Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Tempat Wisata Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Hastutik, Dwi, Dwiningtyas Padmaningrum, And Agung Wibowo. 2021. “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.” *Agritexts: Journal Of Agricultural Extension* 45(1): 46.
- Mamonto, Halid. 2021. “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.” *Jurnal Politico* 10(1): 1–11.
- Mertha, Wayan. 2019. “Konsep Pengelolaan Destinasi Pariwisata.” : 21–23. Nugraha, Harry Setya. 2016. “Hukum Tata Negara.” : 1–23.
- Potchana, Suansri. 1997. *Community Based Tourism Handbook: Rest Project*.
https://drive.google.com/file/d/1qs57axynapp8fjtug6-2x7cjwd_Pcyg/view.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2015. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa.” *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum* 8(3): 424–40.
- Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, And Welly Waworundeng. 2018. “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Eksekutif* 1(1): 1–10.
- Sintia Handayani, Saifuddin, And Rika Damayanti. 2024. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ekonomi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7(1): 153–65.
- Sri, Amelia, And Kusuma Dewi. 2014. “Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.” *V(1): 1– 14*.
- Suryani, Dinan Kurniawan Eny Inti Putri Rahmaini. 2025. “Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh) Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Wisata Mata Air Desa Simpang.” *5(2)*.
- Ubaidulloh, Ervin Muhammad, And Danang Purwanto. 2025. “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sumberbulu Karanganyar.” *Jurnal Educatio Fkip Unma* 11(2): 387–94.
- Widaningsih, Neni Et Al. 2024. “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Desa Wisata Nglanggeran.” *Jurnal Industri Pariwisata* 7(1): 56–67.
- Wirawan, Putu Eka, And I Made Trisna Semara. 2021. *Pengantar Pariwisata*.
- Sumber – Sumber Lain
- Peraturan Desa Hesang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Sombo Kona
 - Peraturan Desa Hesang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelestarian Lingkungan di Sekitar Kawasan Wisata

- Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan dan Usaha Wisata
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
- Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan